

AKIBAT HUKUM PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN ANTAR WARGA NEGARA

Yana Indawati
Fakultas Hukum- UPN “Veteran” Jawa Timur

Abstraks

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, meneliti secara normatif serta mengetahui akibat hukum perceraian dalam perkawinan campuran antar Warga Negara terhadap harta bersama maupun terhadap hak perwalian anak menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Metode penelitian ini didesain dengan langkah-langkah pendekatan masalah yaitu dengan cara menganalisa semua permasalahan yang ada kemudian ditinjau dari segi hukum atau perundang-undangan yang berlaku.

Pengumpulan data primer yaitu bahan diperoleh dari perundang-undangan atau produk hukum yang berlaku saat ini. Data sekunder diperoleh dari penelaahan kepustakaan dari literatur-literatur, karya tulis ilmiah dan buku-buku.

Analisa data dilakukan dengan metode interpretasi atau penafsiran melalui Library Research dengan berdasar pada data primer dan data sekunder, sehingga dapat menjelaskan permasalahan yang ada secara lebih rinci.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa harta benda dalam perkawinan campuran antar warga Negara termasuk dalam bidang status personal, sehingga apabila terjadi perceraian maka diberi kebebasan untuk menentukan sendiri hukum yang berlaku bagi harta benda perkawinan mereka, apabila mereka tidak menggunakan kesempatan ini maka berlaku hukum intern dari Negara tempat kedua suami isteri menetapkan kediaman sehari-harinya yang pertama setelah perkawinan. Untuk hak perwalian anak ditentukan oleh pengadilan, mengenai status warga Negara dalam UU kewarganegaraan telah diatur bahwa anak hasil perkawinan campuran antar warga Negara memiliki 2 kewarganegaraan sampai anak tersebut berusia 18 tahun.

Kata kunci : perceraian, perkawinan campuran, antar warga negara

PENDAHULUAN

Perkawinan campuran telah merambah seluruh pelosok tanah air dan kelas masyarakat. Globalisasi informasi, ekonomi, pendidikan dan transportasi telah menggugurkan stigma bahwa kawin campur adalah perkawinan antara ekspatriat kaya dan orang Indonesia.

Menurut hasil survey online yang dilakukan Indo-MC tahun 2002 dari 574 responden yang terjaring 95,19% adalah perempuan warga negara Indonesia (WNI) yang melakukan pernikahan dengan warga negara asing (WNA). Sebagian besar adalah pengenalan melalui internet, kemudian bekas teman kerja/bisnis, berkenalan saat libur, bekas teman sekolah/kuliah dan sahabat pena.

Istilah perkawinan campuran disini yang sering dinyatakan anggota masyarakat sehari-hari ialah perkawinan campuran karena perbedaan adat/suku bangsa yang bhineka atau karena perbedaan agama antara kedua insan yang akan melakukan perkawinan (hilman hadikusuma, 2003).

Menurut ketentuan Pasal 57 UU no.1 tahun 1974 pengertian perkawinan campuran didefinisikan sebagai “yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.

Semua persoalan hukum yang timbul karena perkawinan campuran ini memperlihatkan unsur-unsur asing sehingga dalam hal ini persoalan tersebut

termasuk dalam bidang Hukum Perdata Internasional (selanjutnya disingkat dengan HPI). Dalam Undang undang Kewarganegaraan yang baru, Undang undang Nomor 12 Tahun 2006 memperbolehkan status kewarganegaraan ganda bagi anak dari hasil perkawinan campur antar warga negar, hingga mencapai usia 18 tahun atau telah menikah.

Masalah perceraian termasuk dalam bidang status personal, dimana perceraian yang dilakukan antara pasangan yang berkewarganegaraan sama menjadi tidak masalah, tetapi menjadi kurang dan sedikit ada masalah jika pasangan suami istri tersebut mempunyai kewarganegaraan yang berbeda. Disamping itu juga terdapat akibat hukum lain yang ditimbulkan karena perceraian dalam perkawinan campuran antar Warga Negara antara lain sebagai berikut(sudargo gautama,2005) :

- a. Akibat terhadap Harta Benda bersama setelah kawin
- b. Akibat terhadap Hak Perwalian anak dari hasil perkawinan campuran antar Warga Negara
- c. Akibat terhadap status kewarganegaraan anak dan masing-masing pihak

Ada kalanya perceraian dari perkawinan campuran tidak menimbulkan masalah pada akibat hukum yang ditimbulkannya. Hal ini karena adanya kesepakatan yang dibuat antara pihak suami dan istri baik mengenai harta bersama setelah perkawinan dan hak perwalian anak maupun status kewarganegaraan anak dan masing-masing pihak. Sehingga proses peradilan menjadi cepat dan tidak berlarut-larut. Hal ini seperti yang terjadi pada kasus perceraian Titi Dwijayanti dengan Andrew Hollis Dogharty. Dalam sidang kedua yang menjadi sidang terakhir proses perceraian mereka, memutuskan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri pernikahan mereka dengan damai dan tanpa perselisihan. Keputusan berpisah secara damai yang dibuat oleh Titi DJ dengan Pria yang berkewarganegaraan Amerika ini bisa menjadi contoh kedewasaan dalam mengakhiri sebuah ikatan pernikahan. Perselisihan mengenai harta gono gini dan hak atas perwalian anak yang sering menjadi sebuah konflik pasca perceraian sama sekali tidak nampak pada proses persidangan. Mereka sepakat harta gono gini tidak dibicarakan di persidangan, perkembangan dan sebagainya tanpa ada batasan.

Lain halnya dengan kasus mantan peragawati Auk Murat yang menikah dengan Andre JM, pria kebangsaan Australia pada tahun 1997. Karena Andrew berkewarganegaraan asing maka sesuai UU Nomor 62 tahun 1958, praktis kewarganegaraan kedua anaknya yang masih dibawah umur juga mengikuti ayahnya, sampai mereka berhak menentukan kewarganegaraannya sendiri pada usia 18 tahun. Itu sebabnya setahun sekali Auk harus mengurus izin tinggal kedua anaknya. Telat mengurus, ancaman deportasi terhadap kedua anaknya terbentang didepan mata. Auk sudah menyadari resiko ini. Ia pun tidak mempernasalahkan. Namun persoalan muncul ketika tahun 2003 silam, saat Auk dan Andrew bercerai, pengadilan menunjuk Auk sebagai pengasuh kedua anaknya, maka rasa was-was sering menghantui Auk. Pasalnya bila terjadi sengketa dengan mantan pasangan, sewaktu-waktu anak-anak bisa terlepas dari asuhan. Seorang ibu tidak memiliki perlindungan hukum untuk melindungi anak-anaknya sendiri. Hak sebagai ibu tidak dilindungi pemerintah.

Berkaitan dengan uraian dan gambaran kasus dari perkawinan campuran antar warga negara yang saat ini telah menjadi tren dikalangan masyarakat baik kelas bawah maupun kelas atas, maka perlu diadakan penelitian secara normatif yang dikaji dari bahan hukum primer dan sekunder mengenai akibat hukum perceraian dari perkawinan campuran antar warga negara.

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian adalah Apakah akibat hukum perceraian dari perkawinan campuran antar warga negara terhadap harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Apakah akibat Hukum perceraian dari perkawinan campuran antar warga negara terhadap hak perwalian anak?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) dan pendekatan konsep (Conceptual Approach). Titik tolak penelitian ini adalah pada konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian dalam perkawinan campuran antar Warga Negara serta mengkaji dari segi aturan-aturan hukum terhadap penerapannya.

Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan diantaranya adalah : Undang undang nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, Kitab Undang undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahan hukum sekunder berupa berbagai bahan kepustakaan yang diperoleh melalui buku-buku, karya tulis ilmiah, laporan-laporan dan literatur-literatur.

Teknik pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*). Pengumpulan bahan hukum dilakukan berdasarkan bahan-bahan serta informasi yang dapat memberi petunjuk mengenai bahan hukum primer dan sekunder yang relevan. Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi bahan hukum yang berhasil dikumpulkan berdasarkan kedekatannya dengan rumusan masalah, kemudian dilakukan klasifikasi sesuai dengan permasalahan serta penyusunan bahan hukum menjadi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder yang berhasil diklasifikasi kemudian analisis dengan menggunakan metode interpretasi atau penafsiran, sehingga dapat menjelaskan permasalahan yang ada lebih rinci. Permasalahan yang ada dianalisis dan dipecahkan sesuai dengan kerangka teori pada tinjauan pustaka serta dikaitkan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan. Jawaban yang didapat kemudian dijadikan bahan dalam penelitian ini. Bahan-bahan atau data-data yang diperoleh dan diperlukan tersebut diinventarisasi, kemudian terhadap bahan hukum yang sesuai dengan pokok permasalahan dilakukan identifikasi untuk digunakan sebagai bahan analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan campuran antar warga negara

Ketentuan Pasal 1 Undang undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari definisi terkandung lima unsur didalamnya yakni : ikatan lahir batin, antara seorang pria dan wanita, sebagai suami istri, membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Didalam *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut dengan BW) tidak memberikan definisi tentang perkawinan. Istilah perkawinan (*huwelijik*) digunakan dalam dua arti yaitu: perbuatan “melangsungkan perkawinan”, seperti yang digunakan dalam Pasal 104 BW. Jadi perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan pada saat tertentu; “suatu keadaan hukum” yaitu keadaan bahwa seorang pria dan seorang wanita terikat oleh suatu hubungan perkawinan. Maka perkawinan dalam arti “keadaan hukum” adalah suatu “lembaga hukum”. Apabila perkawinan itu suatu lembaga hukum, maka bukan tentang pelangsungan perkawinan, tetapi tentang “keadaan” yang merupakan akibat dari perbuatan itu yang seluruhnya dikuasai oleh bentuk-bentuk norma perkawinan. Hubungan pihak-pihak dalam perkawinan adalah suatu gejala dari sesuatu bentuk umum kehidupan bersama dari satu pola kemasyarakatan(Martiman Prodjodikoro,2001).

Pengertian Perkawinan Campuran diatur dalam ketentuan pasal 57 Undang undang Perkawinan Nomor 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dalam perkawinan

campuran dalam Undang undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Dari rumusan tersebut pengertian perkawinan campuran menjadi lebih sempit karena pembentuk Undang undang hanya memberikan pengertian perkawinan campuran dalam arti hanya perkawinan antar Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA).

Syarat-syarat pelaksanaan Perkawinan Campuran didalam ketentuan Pasal 2 Undang undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 menyebutkan: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya; tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk perkawinan campuran antar warga negara diatur dalam ketentuan pasal 83 BW, perkawinan dilangsungkan antara dua orang warga Negara Indonesiadiluar negeri atau antara seorang warga Negara Indonesia dengan seorang warga Negara asing. Pihak Indonesia diwajibkan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 27 sampai dengan pasal 49 BW, yaitu mengenai syarat-syarat materiil. Bagi yang berkewarganegaraan Indonesia berlaku *statuta personalia* (pasal 16 AB) yang didalamnya juga terkandung kewenangan untuk melangsungkan perkawinan. Bagi suami istri yang melangsung perkawinan diluar negeri dan kemudian pulang ke tanah dalam batas waktu satu tahun, maka akte perkawinan mereka yang dibuat diluar negeri harus didaftarkan dalam register umum tempat kediaman mereka, seperti yang diatur dalam ketentuan pasal 84 BW. Mengenai tempat kediaman yang dimaksud adalah tempat kediaman menurut ketentuan Hukum Privat Internasional, yaitu ibu kota Negara (Jakarta). Apabila akte perkawinan tersebut tidak didaftarkan, maka perkawinan itu dianggap tetap sah pla oleh karena tidak ada sanksinya. Akan tetapi jika didaftarkan, maka dianggap diketahui umum di Indonesia.

Perceraian dalam Perkawinan Campuran antar Warga Negara

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah didepan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang. Secara umum mengenai putusnya hubungan perkawinan ini dalam tiga golongan seperti yang tercantum dalam pasal 38 UU no.1 tahun 1974 yaitu; kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Menurut ketentuan Pasal 209 Kitab Undang Undang Hukum Perdata mengenai berbagai alasan yang dapat mengakibatkan perceraian, yakni: *Overspel*(perzinahan), meninggalkan pihak yang lain tanpa alasan, dikenakan pidana penjara selama lima tahun atau lebih setelah perkawinan dilangsungkan, isteri/suami yang mengalami luka berat akibat penganiayaan sehingga membahayakan jiwa pihak yang teraniaya. Sedang menurut ketentuan Pasal 39 ayat 1 Undang undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

Perceraian dalam perkawinan campuran termasuk dalam bidang status personal Hukum Perdata Internasional (*selanjutnya disingkat dengan HPI*). Hal ini menjadi tidak ada masalah apabila suatu perceraian itu dilakukan oleh suami-istri yang mempunyai kewarganegaraan yang sama, tetapi menjdi kurang apabila suami-istri mempunyai kewarganegaraan yang berbeda. Persoalan perceraian dalam bidang HPI dibagi dalam beberapa aspek yang menarik perhatian, antara lain; Perceraian dari Warga Negara Indonesia, perceraian dari orang-orang di Indonesia, persoalan Jurisdiksi dalam perkara-perkara perceraian, pengakuan terhadap keputusan-keputusan cerai dari luar negeri(sudargo gautama,2005).

Mengenai perceraian orang-orang asig yang dilakukan di Indonesia ini menjadi sangat menarik karena menyangkut kompetensi dan persoalan tentang hukum mana yang dipergunakan (*choice of law*). Bagi orang-orang asing yang berada diwilayah Indonesia, Pengadilan Negeri dapat memberikan keputusan-keputusan perceraian, bilamana kedua mempelai bertempat tinggal di Indonesia. Hal ini menjadi

tidak masalah. Yang menjadi persoalan adalah apabila hanya salah satu pihak saja yang berada di Indonesia sedang pihak yang lain berada di luar negeri, maka tuntutan perceraian diajukan di Pengadilan Negeri dan apabila para pihak tidak *mendalilkan* kewarganegaraannya mereka, maka Hakim mempergunakan hukum Indonesia, tanpa menghiraukan segi-segi HPInya. Jika para pihak *mendalilkan* kewarganegaraannya maka perlu diperhatikan "*choice of law*". Sesuai dengan asas kewarganegaraan, suatu keputusan cerai yang diucapkan diluar negeri antara para pihak yang kedua-duanya adalah WNI hanya dapat diakui Hakim Indonesia, jika keputusan bersangkutan didasarkan atas alasan-alasan yang dikenal dalam Hukum Indonesia.

Teori tentang Harta Benda Perkawinan

Menurut ketentuan Pasal 119 Kitab Undang undang Hukum Perdata, sejak dilangsungkannya perkawinan antara suami istri secara hukum (*van rechtswege*) terjadilah kebersamaan harta perkawinan sejauh hal tersebut tidak menyimpang dari perjanjian kawin. Dengan demikian terbukti bahwa walaupun ada kebersamaan secara bulat, tetapi ada kemungkinan bahwa barang-barang tertentu yang diperoleh suami atau istri dengan cuma-cuma, yaitu karena pewarisan secara *testamentair*, secara *legaat* atau hadiah, tidak masuk dalam kebersamaan harta kekayaan itu, tetapi menjadi milik suami pribadi atau milik istri pribadi. Hal ini terdapat dalam ketentuan pasal 120 Kitab Undang undang Hukum Perdata.

Menurut UU Perkawinan tentang harta benda dalam perkawinan diatur dalam tiga pasal saja yaitu pasal 35,36, dan 37 yaitu : harta bawaan, hadiah dan warisan; harta bersama suami isteri; dan bila terjadi perceraian, harta diatur menurut hukumnya masing-masing, ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.

Secara umum di Indonesia berlaku dua sistem peraturan tentang harta benda perkawinan yang satu sama lain berhadapan secara diam artinya berseberangan satu sama lain yakni : Hukum Islam dan Kitab Undang undang Hukum Perdata. Menurut Hukum Islam menganggap kekayaan suami dan isteri masing-masing terpisah satu dengan lainnya, artinya atas harta benda milik suami, si isteri tidak mempunyai hak, dan terhadap barang-barang milik si isteri, si suami tidak mempunyai hak. Jadi konsekwensi menurut Hukum Islam, status harta benda, status harta benda seorang perempuan tidak berubah dengan adanya perkawinan. Sedangkan menurut Kitab Undang undang Hukum Perdata menganggap bahwa apabila suami dan isteri pada waktu akan melangsungkan perkawinan tidak mengadakan perjanjian pisah harta diantara mereka maka akibat dari perkawinan itu adalah percampuran kekayaan suami dan isteri menjadi satu kekayaan milik berdua secara bersama-sama dan bagian masing-masing dalam kekayaan bersama ini adalah separuh. Didalam Hukum Adat menganut sistem tengah antara sistem Hukum Islam dan Kitab Undang undang Hukum Perdata artinya ada kemungkinan dalam suatu perkawinan sebagian dari kekayaan masing-masing suami dan isteri terpisah satu dari yang lain, dan ada kemungkinan sebagian kekayaan itu tercampur menjadi harta benda bersama suami isteri (R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1994).

Akibat Hukum Perceraian terhadap Harta Bersama

Dalam hal ini ada perbedaan paham mengenai sifat hukum sebenarnya dari harta benda perkawinan internasional dan hukum mana yang harus digunakan apabila para pihak tidak membuat syarat-syarat perkawinan, maka ada 3 aliran yang perlu dipahami yakni:

1. Pendirian yang memandang hukum harta benad perkawinan seperti *benda tidak bergerak*, karena itu termasuk dengan apa yang dinamakan *status reel*. Dalam pandangan ini dibedakan antara benda-benda yang tidak bergerak dan benda-benda bergerak. Untuk benda tidak bergerak dipakai *Lex Rei Sitae* yakni hukum dari tempat letaknya benda tidak bergerak yang dipergunakan, sedangkan benda-benda bergerak ditaruh dibawah hukum tempat tinggal para mempelai.

2. Pendirina bahwa hukum harta benda perkawinan termasuk bidang *status personal*. Dengan demikian dianut sistem kesatuan daripada hukum yang mengatur harta benda perkawinan tanpa membedakan antara benda-benda yang bergerak dan tidak bergerak.
3. Pendirian bahwa hukum harta benda merupakan suatu kontrak diantara para mempelai, maka kehendak para pihaklah yang menentukan hukum yang harus dipergunakan(Lili Rasjidi,1982).

Dalam Jurisprudensi Indonesia memandang bahwa hukum harta benda termasuk bidang status personal dan pada saat sekarang banyak negara-negara menerima bahwa hukum harta benda perkawinan termasuk bidang status personal. Namun bila menunjuk pada Konvensi HPI Den Haag mengenai Hukum Harta Benda Perkawinan yang ditanda tangani pada tanggal 23 Oktober 1976 (*Convention in the law applicable to matrimonial property regimes*), ditentukan bahwa pertama-tama kepada suami-isteri diberi kebebasan untuk menentukan sendiri hukum yang akan berlaku bagi harta benda perkawinan mereka. Jika mereka tidak menggunakan kesempatan ini, akan berlakulah hukum intern dari Negara tempat kedua suami isteri menetapkan kediaman sehari-harinya yang pertama setelah perkawinan. Pasal 4 ayat 1 berbunyi : “*if the spouses, before marriage, have not designated the the applicable law their matrimonial property regime is governed by the internal law of the state in which both sponses establish they first habitual residence after marriage*”(Bakri.A Rahman dan Ahmad Sukardja;1981)

Hubungan Orang Tua dan Anak dengan berbagai Teori HPI

Hubungan hukum antara orang tua dan anak memperlihatkan berbagai segi yang harus diperhatikan dalam HPI. Pertama perlu dibedakan antara hubungan yang sah dan tidak sah. Sah diartikan hubungan yang timbul karena antara anak dan orang tua terdapat hubungan menurut hukum, disebabkan anak itu dilahirkan dari hubungan perkawinan yang sah. Hubungan hukum antara anak dan orang tua dapat dilahirkan pula karena pengangkatan anak.

Persoalan hukum orang tua dan anak memperlihatkan hubungan tertentu dengan berbagai masalah yang merupakan *algemene leerstukken* dari HPI. Misalnya soal keturunan ini memperlihatkan hubungan erat dengan persoalan tentang titik-titik pertalian (*problemes de rattachement*) pada umumnya. Untuk menentukan hubungan ini, misalnya hukum manakah yang harus dipergunakan dari sang ayah, sang ibu atau sang anak alam suatu peristiwa tertentu yang berkenaan dengan hubungan famili atau berkenaan dengan tuntutan nafkah yang disandarkan atas adanya hubungan kekeluargaan atau dalam hal perlu ditentukan status seorang anak, apabila antara ketiga pihak yang disebut tadi terdapat perbedaan dalam Hukum Personal. Jika kewarganegaraan berbeda dari pihak yang bersangkutan berbeda haruslah dipilih antara hukum nasional dari pihak *parents*(orang tua) atau dari sang anak.

Perwalian Anak

Anak-anak yang belum dewasa dan tidak dibawah kekuasaan orang tua harus ditaruh dibawah perwalian menurut sistem BW Pasal 330 sampai dengan pasal 418a Bab XV. Pasal 330 BW mengatakan bahwa “belum dewasa” adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum pernah kawin. Jika perkawinan mereka putus sebelum mereka berumur 21 tahun maka yang telah kawin itu tidak kembali lagi menjadi belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua berada dibawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bab tersebut.

Didalam UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang perwalian diuraikan pada Bab XI (pasal 50-54). Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan dua orang saksi. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak

tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

Status Kewarganegaraan Anak dari Perkawinan Campuran antar Warga Negara.

Ketentuan dalam Undang undang tentang kewarganegaraan yang lama (UU nomor 62 tahun 1958) dianggap tidak menguntungkan bagi ibu Warga Negara Indonesia yang menikah dengan ayah Warga Negara Asing. Hal ini dikarenakan sang ayah berkewarganegaraan asing, prkatis sesuai ketentuan UU kewarganegaraan yang lama mengikuti sang Ayah. Sebagai konsekuensi dari status sang anak yang berkewarganegaraan asing, orang tua terutama sang ibu harus mengurus izin tinggal anaknya, setahun sekali. Bila telat mengurus maka anak akan dideportasi. Undang undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan dapat dikatakan sebagai salah satu dari sedikit produk fenomenal dibidang legislasi yang berhasil dihasilkan DPR-RI periode 2005-2009.

Mengenai persoalan status anak hasil perkawinan campuran, Undang undang nomor 12 tahun 2006 ini telah memberi jalan keluar yang dirasa sangat membahagiakan bagi Ibu Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Ayah Warga Negara Asing. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang undang nomor 12 tahun 2006 anak yang dilahirkan oleh perempuan Warga Negara Indonesia yang menikah dengan laki-laki Warga Negara Asing, memperoleh status kewarganegaraan yaitu Warga Negara Indonesia. Hal ini berarti status anak tidak mengikuti status kewarganegaraan ayahnya, tercantum dalam pasal 4 huruf d UU Nomor 12 tahun 2006 yang ditulis sebagai berikut : *“warga negara Indonesia adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Asing dan Ibu Warga Negara Indonesia.* Tidak hanya mengatur status kewarganegaraan anak hasil perkawinan yang sah, Undang undang nomor 12 tahun 2006 juga mengatur status kewarganegaraan anak luar kawin yang diakui ayah Warga Negara Asing. Hal ini tercantum dalam pasal 5 ayat (1) yaitu sebagai berikut : *“Anak Warga Negara Indonesia yang lahir diluar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia”.* Bila negara sang Ayah yang berkewarganegaraan asing tersebut menganut asas *ius sanguinis*, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut mempunyai kewarganegaraan ganda. Ketentuan hukum mengenai hal ini juga sudah diatur dalam pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) UU nomor 12 tahun 2006. Dalam ketentuan tersebut nampak bahwa Indonesia memberi dua kewarganegaraan terbatas bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan campuran khususnya bagi anak yang ketentuan negara ayahnya menganut asas *ius sanguinis* ini berarti anak-anak tersebut mendapatkan dua kewarganegaraan ayah dan ibunya, sampai berumur 18 tahun. Setelah itu, mereka harus menentukan kewarganegaraan yang akan dipilihnya. Ini berarti hak wanita yang menikah dengan pria asing, sebagai warga negara Indonesia diakui dan dilindungi pemerintah. Nasib anak-anak juga jadi lebih jelas. Bila anak yang berkewarganegaraan ganda terbatas ini mengalami masalah berkaitan dengan kewarganegaraannya maka untuk menentukan status personalnya akan dipakai kewarganegaraan yang nyata dan efektif. Maksudnya kewarganegaraan mana yang lebih efektif digunakan si anak dalam kehidupan sehari-hari. Ini berkaitan dengan tempat ia tinggal, hubungan kekeluargaan dan sebagainya. Bila ternyata salah satu orang tua meninggal, hukum warisan yang berlaku untuk anak berkewarganegaraan ganda terbatas adalah Hukum Nasional si pewaris saat ia meninggal.

Akibat Hukum Perceraian terhadap Hak Perwalian anak

Ketentuan Undang undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan memberikan jalan keluar bagi anak hasil perkawinan campuran antar warga negara,

yakni memberikan kewarganegaraan ganda sampai dengan anak usia 18 tahun seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 dan juga mengakomodir kepentingan seorang ibu Warga Negara Indonesia yang ingin mengasuh anak kandungnya hasil dari perkawinan campuran dinegaranya sendiri tanpa dibebani dengan kewajiban-kewajiban yang memberatkan oleh Negara. Hal tersebut terutama bila terjadi perceraian. Dalam UU nomor 12 tahun 2006 tidak diatur mengenai perwalian, sehingga apabila terjadi perceraian dalam perkawinan campuran antar warga negara maka diproses melalui pengadilan dan mengenai hak perwalian diputus oleh hakim.

Penentuan mengenai hak asuh apabila terjadi perceraian ditentukan oleh Pengadilan. Pengadilan Agama untuk yang perkawinannya dulu dilakukan secara Islam, Pengadilan Negeri untuk yang perkawinannya dulu dilakukan secara selain Islam. Di Pengadilan Agama dengan berpedoman pada pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) umumnya bagi anak-anak yang belum *mumayyiz* (berusia 12 tahun) hak asuh diberikan pada ibu.

KESIMPULAN

Dari hasil uraian penelitian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa sesuai Konvensi HPI Den Haag mengenai hukum harta benda perkawinan yang ditanda tangani pada tanggal 23 Oktober 1976 (*Convention in the law applicable to matrimonial property regimes*) pada pasal 4 ayat 1 ditentukan bahwa pertama-tama kedua suami isteri diberi kebebasan untuk menentukan sendiri hukum yang akan berlaku bagi harta benda perkawinan mereka. Jika mereka tidak mempergunakan kesempatan ini maka akan berlaku hukum intern dari Negara tempat kedua suami-isteri menetapkan kediaman sehari-harinya yang pertama setelah perkawinan. Prinsip ini telah diterima oleh Hoge Raad (10-2-1976).

Bila terjadi perceraian pada perkawinan campuran, hak asuh/perwalian anak ditentukan oleh pengadilan. Bila hak asuh/perwalian tersebut diberikan kepada sang ibu, terutama dalam hal bila terjadi perceraian dari perkawinan campuran antara ibu Warga Negara Indonesia (WNI) dengan ayah Warga Negara Asing (WNA), maka tidak akan ditemui lagi kesulitan-kesulitan yang muncul. Sebelum Undang-undang no.12 tahun 2006 disahkan, kewarganegaraan anak mengikuti kewarganegaraan sang ayah, sampai ia berumur 15 tahun. Jadi walaupun hak asuhnya diberikan kepada ibu, sang anak berstatus warga negara asing tersebut tidak bisa tinggal bebas di negara ibunya dan rentan dideportasi. Setahun sekali sang ibu harus mengurus izin tinggal bagi anaknya ke kantor imigrasi.

Dengan diberikannya kewarganegaraan Indonesia oleh pasal 4 huruf d UU no. 12 tahun 2006 kepada sang anak maka sang ibu yang berkewarganegaraan Indonesia tersebut tidak perlu lagi mengurus izin tinggal ke kantor imigrasi jadi dengan disakannya UU no.12 tahun 2006 seorang ibu memiliki perlindungan hukum untuk memiliki anaknya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Kusari, 1995 **Perkawinan sebagai sebuah perikatan**, Rajawali pers, Jakarta
- Azyumardi Azra, 1996. **Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani**, Tim ICCE Jakarta.
- Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, 1981. **Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW**, Hidakarya Agung, Jakarta 1981
- Hazairin, 1961. **Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia**, Tintamas, Jakarta 1961
- Hilam Hadikusuma, 2003. **Hukum Perkawinan Indonesia menurut perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama**, Mandar maju, Bandung.
- Lili Rasjidi, 1982. **Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia**, Alumni, Bandung 1982.

M.Yahya Harahap, 1975. **Hukum Perkawinan Nasional**, Zahir Trading, Medan,
M.Idris Ramulyo, 1996. **Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang
undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam**, Bumi
Aksara, Jakarta,
Martiman Prodjohamidjojo, 2001. **Hukum Perkawinan Indonesia**, Indonesia Legal
Center Publishing, Jakarta.
R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1994. **Pluralisme dalam perundang-undangan
Perkawinan di Indoensia**, Airlangga University Press, Surabaya.
Sudargo Gautama, 2005. **Hukum Perdata Internasional Jilid I Buku ke 1**, Alumni,
Bandung.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang **Kewarganegaraan Republik
Indonesia**
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang **Perlindungan Anak**
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang **Perkawinan**